

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pusat pertumbuhan merupakan konsep penting dalam perencanaan wilayah, menurut (Tarigan, 2005) dalam sudut pandang fungsional, pusat pertumbuhan adalah tempat di mana bisnis-bisnis berkumpul dan membentuk hubungan ekonomi yang berdampak baik secara internal maupun eksternal, yang merangsang aktivitas ekonomi. Sedangkan dari sudut pandang geografis, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang menarik dan berbagai jenis bisnis untuk beroperasi di sana, serta menarik masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Hal ini dapat mendorong perkembangan ekonomi, sosial, dan fisik suatu daerah secara terarah dan berkelanjutan. Penetapan pusat pertumbuhan di suatu wilayah memiliki pengaruh dalam menetapkan kebijakan dan peraturan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah, Sari (2021) menjelaskan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan dapat memberikan dampak positif pada wilayah sekitarnya melalui efek polarisasi, efek *trickle-down*, dan mendorong perkembangan wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan sendiri, sehingga pengaruhnya menghasilkan penyetarakan pembangunan, mempermudah koordinasi antar wilayah, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam.

Pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada pusat pertumbuhan, dapat menghasilkan efek yang menguntungkan bagi wilayah sekitarnya. Studi oleh Andrie Arfianto (2020) menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur strategis di

kota-kota utama menciptakan efek *spillover* ke daerah sekitarnya, ketersediaan fasilitas yang memfasilitasi akses masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan layanan masyarakat. Hal ini termasuk peningkatan aktivitas ekonomi di daerah pedalaman dan pengurangan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah terpencil. Untuk itu perlu adanya pengembangan wilayah bertujuan untuk mempercepat kemajuan sosial-ekonomi, mengurangi disparitas antar wilayah, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Harapannya, pusat pertumbuhan dapat menghasilkan dampak positif bagi daerah sekitarnya dengan mempertimbangkan pembangunan wilayah.

Pembangunan wilayah yang efektif bergantung pada kemampuan untuk memahami dan mengelola karakteristik wilayah tertentu. Menurut Santo et al. (2024), perencanaan tata ruang yang komprehensif adalah kunci dalam memaksimalkan potensi lokal, termasuk melalui pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan infrastruktur. Dalam pandangan Stephanie & Setiadi (2024), tata ruang yang baik harus mencakup tiga elemen utama: perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Ketiganya harus dilaksanakan secara terintegrasi untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologis. Hal ini sejalan dengan pendapat Desrinelti et al. (2021), yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis tata ruang dapat membantu mengurangi disparitas antarwilayah dengan memfokuskan pada pengembangan fasilitas dan konektivitas yang merata di seluruh daerah. Ketidakmerataan fasilitas di berbagai wilayah menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Hidayat (2020), ketidakmerataan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan,

dan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik sering kali memperburuk kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Wilayah dengan fasilitas yang lebih lengkap cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena fasilitas tersebut mendukung kegiatan bisnis dan mobilitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan fasilitas dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan dan memperburuk disparitas antarwilayah. Ini juga terjadi di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Langkat.

Isu umum yang sering muncul adalah ketidakmerataan fasilitas publik dan konsentrasi fasilitas tersebut di wilayah tertentu, terutama di pusat kota seperti Stabat. Menurut proyeksi interim tahun 2021-2024, jumlah penduduk Kabupaten Langkat mencapai 1.066.711 jiwa (BPS Kabupaten Langkat 2024). Dengan jumlah penduduk yang tinggi tersebut, tentu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ketimpangan antar wilayah dapat dilihat dari kepadatan penduduk antar kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, kepadatan penduduk paling tinggi berada di kecamatan Binjai yaitu 1170 jiwa/km², sedangkan yang paling rendah berada di kecamatan Bahorok yaitu sebesar 39 jiwa/km² (BPS Kabupaten Langkat 2024). Disparitas ini sering kali menyebabkan penduduk di daerah kurang padat menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar akibatnya, daerah yang kurang padat cenderung tertinggal dalam hal akses terhadap fasilitas yang penting bagi pengembangan kualitas hidup masyarakat (Suryadi, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya rencana pembangunan yang lebih inklusif dan strategis, yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus di setiap kecamatan.

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Langkat 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Bohorok	1.101,83	42.730	39
2	Sirapit	98,5	17.202	175
3	Salapian	221,73	26.735	121
4	Kutambaru	236,84	14.534	61
5	Sei Bingai	333,17	53.417	160
6	Kuala	206,23	41.309	200
7	Selesai	167,73	75.833	452
8	Binjai	42,05	49.217	1170
9	Stabat	108,85	95.448	877
10	Wampu	194,21	43.578	224
11	Batang Serangan	899,38	36.537	41
12	Sawit Seberang	209,1	26.331	126
13	Padang Tualang	221,14	55.699	252
14	Hinai	105,26	54.980	522
15	Secanggih	231,19	73.155	316
16	Tanjung Pura	179,61	71.499	398
17	Gebang	178,49	49.790	279
18	Babalan	76,41	57.648	754
19	Sei Lapan	280,68	51.257	183
20	Brandan Barat	89,8	25.057	279
21	Besitang	720,74	46.384	64
22	Pangkalan Susu	151,35	45.269	299
23	Pematang Jaya	209	13.102	63

Sumber: BPS Kabupaten Langkat 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, kecamatan-kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi sering kali berfungsi sebagai pusat-pusat aktivitas utama, seperti pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan. Menurut Gunawan & Hartono (2020) keberadaan pusat-pusat di daerah tertentu didorong oleh faktor kemudahan akses, termasuk ketersediaan transportasi dan infrastruktur yang memadai. Variasi kepadatan penduduk di berbagai kecamatan di Kabupaten Langkat menunjukkan adanya konsentrasi penduduk yang mengarah ke pusat-pusat perkembangan

wilayah atau pusat kota. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan wilayah Kabupaten Langkat, penting untuk melakukan kajian yang mendalam guna mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan serta hubungan interaksi antara pusat pertumbuhan tersebut dengan daerah pendukungnya. Dengan mengidentifikasi kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan, pemerintah dapat mengembangkan sektor-sektor kunci seperti pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata secara lebih terarah. Identifikasi kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan dan hinterland akan membantu pemerintah dalam merumuskan strategi kerjasama yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan (Putra & Mirzaya, 2023). Hal ini akan mendukung diversifikasi ekonomi dan menciptakan ekonomi yang lebih stabil serta berkelanjutan.

Salah satu manfaat utama dari pengembangan pusat pertumbuhan adalah penciptaan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prasetyo (2020), pengembangan sektor-sektor ini berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja yang mengurangi pengangguran di daerah-daerah yang kurang berkembang. Pengembangan pusat pertumbuhan juga harus memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan (Alimudin, 2021). Pusat pertumbuhan yang direncanakan dengan baik dapat meningkatkan daya saing wilayah secara keseluruhan. Untuk

menentukan kecamatan mana yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan dan hinterland, serta kesesuaiannya dengan kebijakan RTRW, diperlukan metode analisis yang tepat (Rizal, 2022). Penelitian ini akan menggunakan Indeks Sentralitas untuk mengukur seberapa sentral suatu kecamatan dalam jaringan wilayah, Metode König dan Shimbel untuk menganalisis hubungan fungsional antar wilayah, Breaking Point untuk menentukan batas-batas wilayah pengaruh dari pusat pertumbuhan, dan Nilai Gravitasi untuk mengukur daya tarik ekonomi antar kecamatan. Untuk menganalisis kesesuaian pusat pertumbuhan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Langkat merujuk pada kebijakan RTRW Kabupaten Langkat 2013-2033 yang di analisis sesuai matriks hasil analisis dengan kebijakan RTRW Kabupaten Langkat 2013-2033. Dengan menggunakan metode-metode analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis data mengenai kecamatan mana yang memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan *hinterland* di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecamatan di Kabupaten Langkat yang memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan *hinterland*, serta menganalisis kesesuaian pengembangan tersebut dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan pedoman perencanaan yang telah ditetapkan, mendukung pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Pusat Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland* di Kabupaten Langkat”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadi ketidakmerataan dalam perkembangan wilayah di berbagai kecamatan di Kabupaten Langkat.
2. Terlihat adanya konsentrasi jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan pusat kota.
3. Fasilitas seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tidak merata antar kecamatan, khususnya di kecamatan yang terletak jauh dari pusat pelayanan.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu, kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan dan hubungan interaksi antara pusat pertumbuhan tersebut dengan daerah pendukungnya berdasarkan sistem pusat pelayanan RTRW 2013 – 2033 di Kabupaten Langkat.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kecamatan-kecamatan mana yang berpeluang sebagai pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* berdasarkan indeks sentralitas, *konig* dan *shimbel*, dan nilai gravitasi?
2. Bagaimana Kesesuaian pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* berdasarkan sistem pusat pelayanan wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat 2013-2033?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland*.
2. Menganalisis kesesuaian pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang geografi terutama dalam bidang perencanaan wilayah bagi pembaca.
2. Secara praktis, bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan rujukan untuk mengkaji pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* di Kabupaten Langkat.
3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan studi serupa dengan perbedaan waktu dan lokasi.